

MANAJEMEN PENDIDIKAN DEMOKRASI DALAM MEMBINA PERILAKU KEBINEKAAN PADA PONDOK PESANTREN

DEMOCRACY EDUCATION MANAGEMENT IN DEVELOPING DIVERSITY BEHAVIOR IN PESANTREN

Taupik Rohmansyah¹, Heru Sujiarto², Hanafiah³, Ahmad Khorih⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Nusantara, Indonesia

¹Email: taupikrohmansyah@gmail.com

²Email: sujiarto@gmail.com

³Email: hanafiah@gmail.com

⁴Email: khoriahmad@gmail.com

ABSTRAK

Penerimaan pesantren terhadap hal-hal baru dengan tetap mempertahankan hal-hal yang lama dengan syarat baik (*ashlah*) dalam perspektif agama dan kebutuhan umat, menjadikan pesantren mampu bertahan dan menyeleraskan dengan perkembangan yang ada, mampu membedakan nilai-nilai baru dengan menggunakan rujukan kitab kuning. Termasuk dalam merespon isu-isu kenegaraan, sosial politik, hak azasi manusia, kemajemukan sosial budaya dan demokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan kajian teori pokok manajemen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada setiap tahapan manajemen, baik perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi di implementasikan dengan baik. Selanjutnya bahwa dalam kurikulum pendidikan pesantren secara eksplisit tidak tercantum istilah pendidikan demokrasi, namun semangat, nilai, gagasan, persepsi dan praktik demokrasi justru mewujud dalam kehidupan keseharian pesantren, seperti terbangunnya semangat kerjasama dalam proses pembelajaran santri, penghargaan kepada sesama santri dan guru-guru, ustadz dan Kyai, juga pemilihan ketua santri secara reguler terjadi dalam kehidupan keseharian pesantren dan memiliki pengaruh yang besar dan bermakna terhadap perkembangan santri. Maka bisa disebutkan sebagai *The Hidden Curriulum*, yakni kurikulum yang secara definitif digambarkan sebagai berbagai aspek dari pesantren diluar kurikulum yang dipelajari; seperti aspek organisasi, sistem sosial dan budaya, namun mampu memberikan pengaruh dalam perubahan nilai, persepsi dan perilaku santri.

Kata Kunci: Manajemen, Pendidikan Demokrasi, Perilaku Kebinekaan

ABSTRACT

Boarding school's acceptance of new things while retaining the old things on good terms (ashlah) allows the boarding to survive and align with existing developments and deconstructs new values using the yellow book as a reference, including state, social politics, human rights, sociocultural diversity, and democracy responses. This study employs a qualitative approach with descriptive methodologies: observation, interviews, and documentation for data gathering, and focuses on management theory. The results demonstrated that each level of management is properly implemented. Furthermore, the term democratic education is not explicitly stated in the curriculum of boarding education; however, the spirit, values, ideas, perceptions, and practices of democracy manifested in daily life, such as the building of the spirit of cooperation in the student's learning process, appreciation for fellow students and teachers, cleric and kyai, as well as the election of chairman regularly. The curriculum, which is considered to hidden, is firmly stated as numerous characteristics of the boarding school outside the studied ones, such as organizational aspects, social, and cultural systems, yet it is able to affect changes in students' values, perceptions, and actions.

Keywords: Management; Democratic Education; Diversity Behavior



PENDAHULUAN

Pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan masih menampakan ciri-ciri yang bercorak “tradisional dan khas” Indonesia. Kekhasannya terletak pada pola tradisi yang bersifat indogenius yang dapat mempertemukan secara berdampingan antara nilai dan norma tradisional yang bersifat positif dari lingkungan masyarakat dengan manifestasi keislamannya, sehingga terciptalah suatu konfigurasi khas pesantren yang oleh Dhofier (2013) disebut sebagai “tradisi pesantren”. Kekhasan tradisi pesantren tersebut menurut Wahid (2010) disebut sebagai “subkultur”, dimana kekhasannya terletak pada cara hidup yang dianut, tata nilai dan pandangan hidup yang diikuti, serta hierarki kekuasaan intern yang ditaati.

Tradisi pesantren dengan berbagai kekhasannya itu kemudian berdialektika dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat dan secara terus menerus terwariskan melalui proses kembalinya para-alumni pesantren ke tempat masing-masing dengan beragam aktivitas sosial yang digelutinya. Terdapat alumni pesantren yang berkiprah dibidang usaha (berdagang), menjadi pengurus organisasi, mendirikan pesantren baru, menjadi anggota parlemen atau bahkan ada yang menjadi pejabat pemerintahan.

Tradisi pesantren terpenting terletak pada tradisi keagamaannya. Karena ia merupakan bagian dasar, terintegrasi dan relatif sulit untuk berubah. Tradisi keagamaan ini terpelihara dari generasi ke generasi dengan berbagai cara penyampaian, yang bersumberkan dari ajaran kitab-kitab klasik islam. Dikalangan para kyai dan santri di berbagai pesantren kitab-kitab tersebut diterima tidak hanya sebagai pengetahuan semata, namun juga di terima sebagai landasan teologis dan pandangan hidup yang harus diwujudkan dalam sikap dan tingkah laku sosialnya.

Menurut Dhofier (2013:51) dari kitab-kitab yang diajarkan itulah kemudian menghasilkan suatu homogenitas yang terintegrasi dari kebudayaan, pandangan hidup serta

praktek-praktek yang ada dalam tradisi pesantren, yang selanjutnya akan memperlihatkan pola yang sama akan keberadaan pesantren-pesantren di Indonesia.

Tradisi keagamaan pesantren menghasilkan bangunan pemikiran khas dari kalangan pesantren. Sampai saat ini masih banyak pesantren yang menjadikan pengajaran kitab-kitab klasik/kitab kuning sebagai inti pendidikan pesantren, sedangkan sistem sekolah atau madrasah hanyalah untuk meneguhkan dan mengintensifkan pengajaran kitab-kitab tersebut. Bahkan ada beberapa pesantren yang sama sekali tidak memperkenalkan macam-macam ilmu pengetahuan umum. Pesantren jenis ini di sebut sebagai pesantren salafiyah (kuno/tradisional). Sedangkan pesantren yang telah mulai memperkenalkan ilmu pengetahuan umum dan membuka sekolah-sekolah umum disamping pengajaran utama kitab-kitab kuning disebut pesantren khalafiyah (modern).

Pesantren dengan dinamika perjalanannya mampu mempertahankan diri dengan tradisi yang dimilikinya. Penerimaan pesantren terhadap hal-hal baru dengan tetap mempertahankan hal-hal yang lama dengan syarat baik (*ashlah*) dalam perspektif agama dan kebutuhan ummat, menjadikan pesantren mampu bertahan dan menyeleraskan dengan perkembangan yang ada. Pesantren mampu bertahan dengan tradisi pesantrennya dalam membedah nilai-nilai baru dengan menggunakan rujukan kitab pesantren. Termasuk didalamnya isu-isu, kenegaraan, sosial, hak azasi manusia, dan kemajemukan sosial budaya.

Begitupun dengan konsepsi demokrasi, pesantren telah mampu memperlihatkan tampilan tradisi yang memiliki keselarasan dengan nilai-nilai demokrasi. Padahal dari sisi konsepsi, demokrasi merupakan sesuatu yang baru (al-jadid) yang lahir dari kebutuhan manusia akan pentingnya membangun struktur sosial yang disepakati secara bersama. Sesuatu yang baru ini, dalam tradisi pesantren pasti telah mengalami proses kajian mendalam biasanya dalam bentuk bahtsul masail.

Demokrasi sebagai nilai baru, lahir dari gagasan awal tentang “*government from the people, by the people and for the people*” yang kemudian dijadikan sebagai anutan bersama semua bangsa dan negara-negara di dunia. Demokrasi kemudian tidak sekedar *government by the people* atau dianggap hanya sebagai system politik semata, tetapi juga suatu gaya hidup serta tata masyarakat tertentu, yang karena itu juga mengandung unsur-unsur moral (Budiardjo, 2008:118).

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 telah menetapkan prinsip penyelenggaraan pendidikan yang demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural dan kemajemukan bangsa. Selanjutnya di perkuat oleh UU nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang menyatakan bahwa: Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. (Pasal 15). (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum Pendidikan masing-masing Pesantren. (2) Fungsi Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membentuk Santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman. (Pasal 16). Pengelolaan pendidikan demokrasi di pesantren secara keseluruhan berada pada tanggungjawab Kyai sebagai pemimpin utama, Guru dan santri dalam kapasitasnya sebagai siswa di pesantren.

Menurut Boone dan Kurtz (1984:4-6) bahwa “manajemen adalah penggunaan orang dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan. Proses manajerial terdiri dari empat fungsi yang harus di jalankan oleh setiap manajer, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Perencanaan (planning) adalah yang dilakukan oleh manajer untuk mencapai tujuan, menilai masa depan dan mengembangkan tindakan untuk mencapai tujuan.

Pengorganisasian (organizing) adalah proses mengatur orang dan sumber daya fisik untuk melaksanakan

rencana dan mencapai tujuan organisasi. Pelaksanaan (leading) adalah tindakan memotivasi atau menyebabkan orang melaksanakan tugas tertentu yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Itu adalah tindakan membuat sesuatu terjadi. Kemudian pengendalian (controlling) adalah proses dimana manajer menentukan apakah tujuan organisasi tercapai dan apakah pelaksanaan aksi konsisten dengan rencana.”

Dalam kaitan ini, terdapat beberapa kondisi yang mesti ditempuh dalam rangka pengelolaan pendidikan demokrasi di pesantren yaitu antara lain Pertama, keterbukaan saluran ide dan gagasan, sehingga semua orang bisa menerima informasi seoptimal mungkin. Kedua, memberikan kepercayaan kepada individu-individu dan kelompok dengan kapasitas yang mereka miliki untuk menyelesaikan berbagai persoalan sekolah. Ketiga, menyampaikan kritik sebagai hasil analisis dalam proses penyampaian evaluasi terhadap ide-ide, problem dan berbagai kebijakan yang dikeluarkan sekolah. Keempat, memperlihatkan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain dan terhadap persoalan-persoalan publik. Kelima, ada kepedulian terhadap harga diri, hak-hak individu dan hak-hak minoritas. Keenam, pemahaman bahwa demokrasi yang dikembangkan belumlah mencerminkan demokrasi yang diidealkan, sehingga demokrasi harus terus dikembangkan dan bisa membimbing keseluruhan hidup manusia. Ketujuh, terdapat sebuah institusi yang dapat terus mempromosikan dan mengemban cara-cara hidup demokratis. (Beane& Apple dalam Rosyada, 2013:16).

Berdasarkan latar belakang tersebutlah, peneliti ingin mengetahui manajerial pesantren yang dinamis dalam menyikapi perkembangan yang terjadi di Indonesia. Terutama dalam kaitan keragaman dan kemultikulturalan yang ada di Indonesia ini perlu disikapi melalui pendidikan di pesantren. Dalam kemultikulturalan inilah perlunya keterbukaan antarseluruh warga bangsa. Salah satu media pendidikan ini adalah di pesantren, karena itu, salah satu tujuan penelitian ini adalah

bagaimanakah manajerial pendidikan pesantren dalam membina jiwa demokratis seluruh warga pesantren.

METODE

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kualitatif. Menurut Moleong (2007:6) yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Metode yang digunakan adalah Metode Penelitian Interaksi Simbolik. Moleong (2007:19-20) menyatakan bahwa pendekatan ini berasumsi bahwa pengalaman manusia ditengahi oleh penafsiran. Objek, orang, situasi, dan peristiwa tidak memiliki pengertiannya sendiri, sebaliknya pengertian itu diberikan untuk mereka. Penafsiran bukanlah tindakan bebas dan bukan pula ditentukan oleh kekuatan manusia atau bukan. Orang-orang menafsirkan sesuatu dengan bantuan orang lain seperti orang-orang masa lalu, penulis, keluarga, pemeran di televisi, dan pribadi-pribadi yang ditemuinya dalam latar tempat mereka bekerja atau bermain. Orang dalam situasi tertentu, sering mengembangkan definisi bersama (atau perspektif bersama dalam bahasa interaksi simbolik) karena mereka secara teratur berhubungan dan mengalami pengalaman bersama, masalah, dan latar belakang. Di pihak lain sebagian memegang definisi bersama untuk menunjuk pada kebenaran, suatu pengertian yang senantiasa dapat disepakati. Hal itu dapat dipengaruhi oleh orang yang melihat sesuatu dari sisi yang lain. Bila bertindak atas definisi tertentu, sesuatu barangkali tidak akan baik bagi seseorang.

Penelitian ini mengambil subjek penelitian yaitu Kyai, Guru/Ustadz, Ketua Santri dan seluruh elemen yang terkait dan berada dalam lingkup Pondok Pesantren yang tengah peneliti datangi untuk diteliti yaitu pesantren Al-Barkah, Al-hasbi dan Al-Riyadl di

Kabupaten Cianjur. Pengambilan sampel (nara sumber) sumber data dilakukan secara purposive yang bersifat snowball sampling. Sifatnya sementara tetapi akan lebih dikembangkan lagi setelah peneliti berada di lapangan. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Ibarat bola salju yang bila menggelinding, makin lama semakin besar (Komara, 2007: 133).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Pendidikan Demokrasi dalam Bingkai Tradisi Pesantren di Kabupaten Cianjur

Perencanaan pendidikan demokrasi di pesantren memuat beberapa tahapan kegiatan dalam tahap ini, yaitu a. Menentukan kebutuhan dan tujuan yang akan di capai; b. mengadakan observasi dan penelitian atas suatu masalah; c. menetapkan rencana-rencana pilihan; d. menentukan metode; dan e. evaluasi terhadap rencana.

Dewan Guru atau biasa juga Dewan Asatidz merupakan kumpulan guru-guru yang sudah mengabdikan dan layak menjadi pengajar. Proses seleksinya dilakukan oleh Dewan Kyai (bahkan bisa langsung oleh Kyai Senior atau Pendiri). Dewan Guru ini biasanya alumni dari pesantren tersebut atau alumni dari pesantren lain yang keilmuannya sudah diakui dan siap mengabdikan.

Pengurus biasanya santri senior di pesantren tersebut, mereka diangkat menjadi Pengurus untuk membimbing santri-santri, memantau perkembangan santri dan secara 24 (duapuluh empat jam) sehari terlibat dalam pembimbingan santri-santri. Pengurus laki-laki hanya diperkenankan membimbing santri putera, pengurus puteri hanya membimbing santri puteri. Pengurus selain membimbing santri, juga membantu memenuhi kebutuhan santri mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Mencatat, mengabsen dan mengingatkan hal-hal yang menjadi tugas santri.

Ketua Organisasi Santri biasanya disebut Lurah Kobong merupakan santri senior yang dipilih oleh seluruh santri setelah melalui tahapan seleksi oleh Pimpinan Pesantren atau Dewan Kyai. Ketua Santri bertugas mengkoordinir pelaksanaan teknis program pesantren. Mulai dari pengamanan pesantren, pengawalan pengurus pesantren sampai mengawasi keamanan dan keselamatan santri. Organisasi santri biasanya ditugaskan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Ekstrakurikuler dibawah pengawasan Guru. Seringkali masing-masing koordinator ekstrakurikuler aktif di Organisasi Santri.

Pada tahapan perencanaan, pembelajaran dipesantren menekankan pada beberapa hal pokok, yaitu:

- a. Perencanaan dalam kurikulum pendidikan di pesantren-pesantren teridentifikasi mampu pesan-pesan atau isi yang penting dan bermakna. Materi pelajaran melalui pengkajian kitab-kitab pesantren memiliki bobot teoretis dan dipadukan dengan realitas masyarakat sekitar, materi yang mendorong santri untuk mengembangkan kemampuan berfikir kritis dan kemauan untuk mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Perencanaan pada materi pendidikan demokrasi yang dibawa ke ruang kelas tidak hanya bersifat pengetahuan teoretis murni saja melainkan dipadukan dengan kontroversial issues yang tengah merebak dimasyarakat. Dengan demikian, pembelajaran pendidikan demokrasi akan mendorong terjadinya diskusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat dan bangsanya.
- c. Perencanaan pada pelayanan pembelajaran yang optimal kepada siswa, bahwa pendidikan demokrasi mengimplementasikan kurikulum yang fleksibel dan terbuka, sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan siswa. Kebersamaan merupakan ciri pendidikan demokrasi. Proses pembelajaran mengarahkan para siswa untuk bertanggungjawab sendiri atas apa yang dipelajari guna kepentingan mereka sendiri.

- d. Perencanaan pada kegiatan ekstrakurikuler dengan tujuan yang jelas, tidak sekedar pelengkap kegiatan sekolah. kegiatan ekstrakurikuler memiliki tujuan untuk memberikan kemampuan yang belum tercakup dalam intrakurikuler, seperti kepemimpinan, kemampuan merancang masa depan, kemampuan mengambil keputusan, dan kemampuan untuk bekerjasama dan memecahkan masalah secara damai, sarana untuk mengembangkan minat dan bakat siswa.
- e. Perencanaan program pengembangan partisipasi dalam pengembangan sekolah. Sekolah membuka kesempatan dan mendorong stakeholders untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Tanpa ada keterbukaan dari sekolah, tidak mungkin muncul partisipasi yang sehat. Partisipasi dalam beragam variasi diantaranya memberikan sumbangan pemikiran, dalam pengelolaan sekolah, mensinkronkan apa yang ada di sekolah dan lingkungan keluarga masing-masing.
- f. Perencanaan simulasi proses demokrasi disekolah. Apa yang ada dimasyarakat berkaitan dengan demokrasi, perlu juga dikembangkan disekolah sesuai dengan prinsip pendidikan.

Pengorganisasian Pendidikan Demokrasi dalam Bingkai Tradisi Pesantren di Kabupaten Cianjur

Pada tahapan ini dilakukan beberapa langkah kegiatan yaitu penetapan dan pengembangan aktivitas, penyusunan organ atau wadah, mengisi organ dengan tugas, kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab., menghubungkan-hubungkan organ satu dengan yang lain dengan garis wewenang dan tanggung jawab, melengkapi organ dengan alat perlengkapan yang diperlukan, penempatan orang yang tepat pada masing-masing organ, dan membuat bagan organisasi.

Organ-organ yang ada di pesantren-pesantren, biasanya terdiri dari Pimpinan Yayasan yang berperan sebagai Penasehat dan Pembina, Pimpinan Umum Pesantren, Wakil

Pimpinan, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-Seksi meliputi Kurikulum, Pengurusan Santri, Sarana, Humas dan Pembina Ekstrakurikuler. Penamaan atau istilahnya mungkin bisa berbeda antar pesantren.

Secara umum model-model struktur pengelola pesantren sama, jika ditelusuri dari dokumen pembagian Tugas dan Wewenang, satu sama lain memiliki kesamaan. Hanya dari pilihan kata dan susunan redaksional saja yang berbeda. Dari struktur tersebut kemudian disusun nama-nama yang akan mengisi posisi tersebut dan dilengkapi dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing bagian. Penyusunan tugas fungsi dan wewenang di rumuskan secara bersama dan disepakati bersama. Rumusan struktur tersebut kemudian dituangkan kedalam bagan organisasi dan disosialisasikan kepada umum dengan cara di pasang di masing-masing ruangan organ.

Pelaksanaan Pendidikan Demokrasi dalam Bingkai Tradisi Pesantren di Kabupaten Cianjur

Pada tahap pelaksanaan penulis menganalisis pada hal-hal sebagai berikut yaitu membimbing dan memberi motivasi kepada pekerja supaya bisa bekerja secara efektif dan efisien, memberi tugas serta penjelasan secara rutin tentang pekerjaan, menjelaskan semua kebijakan yang sudah ditetapkan. Berdasarkan data yang diperoleh, Pimpinan Pesantren senantiasa melakukan pembimbingan dan motivasi dalam pelaksanaan kegiatan program. Motivasi ini dilakukan agar Guru, Pengurus dan Organisasi Santri terus berkarya dengan optimal, efektif dan efisien dengan sasaran santri-santri yang tengah mondok. Pelaksanaan program pembelajaran di pesantren yang efektif akan menghasilkan out put sesuai yang diharapkan diawal. Efektifitas pengelolaan ketepatan penggunaan waktu menjadi hal yang paling diperhatikan.

Pada tahapan pelaksanaan pendidikan demokrasi dipesantren, menekankan pada beberapa hal pokok yaitu:

a. pelaksanaan pada kurikulum atau pembelajaran pendidikan demokrasi

harus menyampaikan pesan-pesan atau isi yang penting dan bermakna. Materi pelajaran harus memiliki bobot teoretis dan dipadukan dengan realitas masyarakat sekitar, materi yang mendorong siswa untuk mengembangkan critical thinking dan kemauan untuk mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

- b. pelaksanaan pada materi pendidikan demokrasi yang dibawa ke ruang kelas tidak hanya bersifat pengetahuan teoretis murni saja melainkan dipadukan *controversial issues* yang tengah merebak dimasyarakat. Dengan demikian, pembelajaran pendidikan demokrasi akan mendorong terjadinya diskusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat dan bangsanya. Disinilah diperlukan kreativitas dan kecerdikan sekaligus ketelitian seorang guru dalam membaca apa yang tengah terjadi dalam masyarakat.
- c. pelaksanaan pendidikan demokrasi memberikan pelayanan pembelajaran yang optimal kepada siswa. Pendidikan demokrasi mengimplementasikan kurikulum yang fleksibel dan terbuka, sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan siswa. Kebersamaan dan kebersamaan merupakan ciri pendidikan demokrasi. Proses pembelajaran mengarahkan para siswa untuk bertanggungjawab sendiri atas apa yang dipelajari guna kepentingan meeka sendiri.
- d. pelaksanaan terhadap kegiatan ekstrakurikuler dengan tujuan yang jelas, tidak sekedar pelengkap kegiatan sekolah. kegiatan ekstrakurikuler memiliki tujuan untuk memberikan kemampuan yang belum tercakup dalam intrakurikuler, seperti kepemimpinan, kemampuan merancang masa depan, kemampuan mengambil keputusan, dan kemampuan untuk bekerjasama dan memecahkan masalah secara damai, sarana untuk mengembangkan minat dan bakat siswa.
- e. pelaksanaan program pengembangan partisipasi dalam pengembangan sekolah. Sekolah membuka kesempatan dan mendorong stakeholders untuk aktif

- berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Tanpa ada keterbukaan dari sekolah, tidak mungkin muncul partisipasi yang sehat. Partisipasi dalam beragam varias diantaranya memberikan sumbangan pemikiran, dalam pengelolaan sekolah, mensinkronkan apa yang ada di sekolah dan lingkungan keluarga masing-masing.
- f. pelaksanaan simulasi proses demokrasi disekolah. Apa yang ada dimasyarakat berkaitan dengan demokrasi, perlu juga dikembangkan disekolah sesuai dengan prinsip pendidikan.

Pengendalian Pendidikan Demokrasi dalam Bingkai Tradisi Pesantren di Kabupaten Cianjur

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan meliputi tahapan mengevaluasi keberhasilan dan target dengan cara mengikuti standar indikator yang sudah ditetapkan, Memberi tugas serta penjelasan secara rutin tentang pekerjaan, Memberi alternatif solusi yang mungkin bisa mengatasi masalah yang terjadi.

Kegiatan-kegiatan rapat pesantren diatas dilakukan untuk melakukan evaluasi keberhasilan dan target yang telah dicapai berdasar tujuan yang telah ditetapkan di masing-masing bidang. Rapat evaluasi menjadi bagian tak terpisahkan dari keberhasilan program pembelajaran pesantren, sebab antar satu bagian dan bagian lain saling memberikan masukan terkait pelaksanaan program, sehingga dimasa yang akan datang program-program tersebut berjalan dengan sempurna. Sebagai pimpinan tertinggi di pesantren, Kyai menerima masukan dan saran yang berasal dari pengurus bidang/program. Ruang keterbukaan ini sengaja dibuka oleh Kyai sebagai upaya untuk menghadirkan tanggungjawab bersama dalam pengelolaan pembelajaran pesantren.

Pada tahapan pengendalian pendidikan demokrasi dipesantren, menekankan pada beberapa hal pokok yaitu:

- a. Pengendalian pada kurikulum atau pembelajaran pendidikan demokrasi harus menyampaikan pesan-pesan atau isi yang penting dan bermakna.

Materi pelajaran harus memiliki bobot teoretis dan dipadukan dengan realitas masyarakat sekitar, materi yang mendorong siswa untuk mengembangkan *critical thinking* dan kemauan untuk mempraktikan dalam kehidupan sehari-hari.

- b. pengendalian pada materi pendidikan demokrasi yang dibawa ke ruang kelas tidak hanya bersifat pengetahuan teoretis murni saja melainkan dipadukan controversial issues yang tengah merebak dimasyarakat. Dengan demikian, pembelajarn pendidikan demokrasi akan mendorong terjadinya diskusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat dan bangsanya. Disinilah diperlukan kreativitas dan kecerdikan sekaligus ketelitian seorang guru dalam membaca apa yang tengah terjadi dalam masyarakat.
- c. Pengendalian bahwa pendidikan demokrasi memberikan pelayanan pembelajaran yang optimal kepada siswa. Pendidikan demokrasi mengimplementasikan kurikulum yang fleksibel dan terbuka, sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan siswa. Kebersamaa dan kebersamaan merupakan ciri pendidikan demokrasi. Proses pembelajaran mengarahkan para siswa untuk bertanggungjawab sendiri atas apa yang dipelajari guna kepentingan meeka sendiri.
- d. Pengendalian pada kegiatan ekstrakurikuler dengan tujuan yang jelas, tidak sekedar pelengkap kegiatan sekolah. kegiatan ekstrakurikuler memiliki tujuan untuk memberikan kemampuan yang belum tercakup dalam intrakurikuler, seperti kepemimpinan, kemampuan merancang masa depan, kemampuan mengambil keputusan, dan kemampuan untuk bekerjasama dan memecahkan masalah secara damai, sarana untuk mengembangkan minat dan bakat siswa.
- e. Pengendalian program pengembangan partisipasi dalam pengembangan sekolah. Sekolah membuka kesempatan dan mendorong stakeholders untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Tanpa ada keterbukaan dari sekolah,

tidak mungkin muncul partisipasi yang sehat. Partisipasi dalam beragam varias diantaranya memberikan sumbangan pemikiran, dalam pengelolaan sekolah, mensinkronkan apa yang ada di sekolah dan lingkungan keluarga masing-masing.

f. Pengendalian simulasi proses demokrasi disekolah. Apa yang ada dimasyarakat berkaitan dengan demokrasi, perlu juga dikembangkan disekolah sesuai dengan prinsip pendidikan.

Pendidikan Demokrasi

Berdasarkan pada pendapat yang menyatakan bahwa pendidikan demokrasi merupakan suatu teori pembelajaran dan pengelolaan sekolah yang memberikan kesempatan bagi siswa dan guru serta staf administrasi untuk berpartisipasi secara bebas dan setara dalam kegiatan sekolah (Zamroni, 2013:22). Maka penulis melakukan analisis terhadap konsep pendidikan demokrasi di pesantren berdasar data yang telah diobservasi sebelumnya, meliputi kurikulum, materi pembelajaran, pendididkan ekstrakurikuler, partisipai pengelolaan sekolah dan simulasi proses demokrasi.

a. Kurikulum Pendidikan Pesantren

Dalam konteks kurikulum pesantren, pendidikan demokrasi secara eksplisit tidak tercantum dalam kurikulum pesantren yang dirancang sejak awal. Istilah Pendidikan Demokrasi secara khusus tidak ditemukan dalam dokumen-dokumen pembelajaran yang ada di pesantren. Namun semangat, nilai, gagasan dan praktik demokrasi justru mewujud dalam kehidupan keseharian pesantren, seperti terbangunnya semangat kerjasama dalam proses pembelajaran santri, penghargaan kepada sesama santri dan guru-guru, ustadz dan Kyai, terjadi dalam kehidupan keseharian pesantren dan memiliki pengaruh yang besar dan bermakna terhadap perkembangan santri. Maka, jika dilihat dari perspektif kurikulum, bisa disebutkan sebagai munculnya *The Hidden Curriulum*, yang oleh Allan A.Glatthorn, seperti dikutip Rosayadah (2013:28-29) yakni kurikulum yang tidak menjadi bagian untuk di

pelajari, yang secara definitive digambarkan sebagai berbagai aspek dari sekolah diluar kurikulum yang dipelajari, namun mampu memberikan pengaruh dalam perubahan nilai, persepsi dan perilaku siswa.

Kebiasaan pesantren menerapkan disiplin terhadap santri, ketepatan guru/ustadz dalam memulai pembelajaran, kemampuan dan cara-cara guru dalam menguasai kelas, melakukan pendekatan terhadap santri dan terbiasanya santri dalam berorganisasi serta melakukan program-program kerja selama santri menjadi pengurus organisasi, semuanya itu merupakan pengalaman yang dapat mengubah cara berfikir dan perilaku santri pada saat itu dan dimasa yang akan datang.

Masih menurut Glatthorn terkait *The Hidden Curriculum*, Rosayadah (2013:29) mencatat bahwa terdapat tiga variable penting dalam pengelolaan dan pengembangan sekolah yang menjadi bagian integral dari *hidden curriculum*, yaitu Variabel Organisasi, Variabel Sistem Sosial dan Variabel Budaya. Penulis mencoba memerinci ketiga variable tersebut pada konteks pendidikan demokrasi sebagai *hidden curriculum* di pesantren.

1) Variabel Organisasi dalam *The Hidden Curriculum* di Pesantren

Variabel pertama menekankan pada kebijakan penugasan guru dan pengelompokan siswa untuk proses pembelajaran. Fokus perhatiannya yakni terhadap team teaching, kebijakan promosi (kenaikan kelas), pengelompan siswa berdasarkan kemampuan dan pemfokusan kurikulum. Dalam proses pembelajaran di pesantren, team teaching dilaksanakan sebagai upaya agar pengawasan pembelajaran siswa bisa optimal dilakukan. Dimana kebiasaan pesantren menempatkan santri-santri dalam pengawasan Pengurus, sebuah struktur pengelola pesantren yang terdiri dari beberapa orang dalam satu gugus pengurus.

Pengurus biasanya, dalam pesantren yang penulis teliti memiliki peran sangat penting, yaitu membina dan mengawasi santri-santri, mengingatkan pembelajaran dan jadwal kegiatan pesantren, serta mengajarkan

mata pelajaran pesantren yang belum di fahami oleh santri selepas mereka belajar kepada Kyai atau Ustadz pesantren, sebaba biasanya pengurus merupakan santri senior yang diangkat oleh Pimpinan pesantren untuk mendampingi santri-santri yang masih baru. Peran ini, hampir mendekati peran sebagai *team teaching*, dimana dalam satu waktu para santri ikut pembelajaran dengan Kyai atau Guru atas mata pelajaran pesantren, namun di waktu yang lain pengurus juga memberikan pembelajaran kepada santri yang belum memahami materi yang disampaikan oleh Kyai atau Ustadz. Sehingga kondisi ini mirip dengan "pemberian tugas pada beberapa orang guru dalam suatu mata pelajaran dalam kelas yang sama".

2) Variabel Sistem Sosial dalam *The Hidden Curriculum* di Pesantren

Variabel sistem sosial bisa di maknai sebagai suasana pesantren yang tergambar dari pola-pola hubungan hubungan semua komponen pesantren. Faktor-faktanya adalah pola hubungan guru dengan tenaga administrasi, keterlibatan pimpinan pesantren dalam pembelajaran, keterlibatan guru dalam pengambilan keputusan, hubungan yang baik antar sesama guru, hubungan guru dengan santri, interaksi guru dengan santri, keterlibatan santri dalam proses pengambilan keputusan, dan keterbukaan kesempatan bagi santri untuk melakukan berbagai aktifitas.

Di pesantren-pesantren yang diteliti, bahwa pola hubungan guru/ustadz dengan tenaga administrasi terlihat dalam ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran, dokumentasi pembelajaran yang tersimpan dengan baik, serta ketepatan tenaga administrasi dalam merespon kebutuhan guru ketika akan melakukan pembelajaran.

Keterlibatan pimpinan dalam pembelajaran, terlihat dalam kegiatan supervisi kelas oleh pimpinan pesantren, supervisi akademik, dan evaluasi pasca supervisi serta tindak lanjut yang dilakukan oleh pimpinan pesantren kepada guru dalam bentuk penguatan potensi guru melalui pembekalan strategi pembelajaran di awal tahun serta mengirim guru-guru mengikuti pelatihan-pelatihan.

Keterlibatan guru dalam pengambilan keputusan di pesantren, diwujudkan dalam kegiatan rapat guru dan pimpinan di awal tahun pelajaran dalam menentukan disain pembelajaran, strategi pembelajaran menjadi kreatifitas guru, perumusan model evaluasi, serta rancangan tata tertib santri.

Hubungan yang baik antar sesama guru di pesantren menjadi sesuatu yang penting. Komunikasi terjalin melalui beberapa kegiatan diantaranya dalam Musyawarah Guru yang mengampu mata pelajaran/kitab tertentu. Sesama guru saling berdiskusi jika terdapat hal-hal yang masih belum jelas. Dalam tataran adab antar guru senior dan baru, penghormatan diletakan atas perbedaan usia; cara berbicara, posisi berjalan serta mendahulukan yang lebih tua.

Hubungan guru dengan santri, terwujud dalam kegiatan pembelajaran kelas dan diluar kelas. Posisi hubungan santri dan guru dalam kerangka adab santri terhadap guru. Santri masih diperkenankan untuk bertanya dan meminta penjelasan kepada guru dengan cara-cara yang baik. Guru memberikan solusi, jawaban dan pemecahan masalah yang bisa bermanfaat bagi santri. Selanjutnya, guru laki-laki lebih fokus membina dan membimbing santri putera, dan guru perempuan fokus dalam pembimbingan santri putrid. Pemisahan ini lebih kepada menjaga agar tidak terjadi kekeliruan dalam hubungan antara guru dengan santri.

Di pesantren-pesantren, santri diberikan keterbukaan kesempatan untuk melakukan berbagai aktifitas yang bermanfaat bagi dirinya dan berkesuaian dengan kemampuan yang dimiliki oleh santri. Selain pengkajian kitab-kitab kuning sebagai mata pelajaran wajib, santri di berikan ruang memilih untuk menggenapkan potensinya, seperti mengikuti kelas Tahfidz (menghafal kitab suci al-quran) dibawah bimbingan Mursyid-Mursyidah yang khusus memiliki kompetensi dalam tahfidz. Hafalan al-quran ber juz-juz tidak menjadi target utama di pesantren-pesantren ini, yang lebih penting adalah menjaga hafalan yang sudah ada tersebut.

Santri yang memiliki minat terhadap seni kaligrafi arab dan marawis diberikan kesempatan mengikuti kelas ekstrakurikuler ini. Pembimbingannya dilakukan oleh guru dan secara berkala hasil karya santri di pameran di even kegiatan pesantren, seperti saat peringatan Maulid Nabi, Harlah Pesantren, Kenaikan Kelas dan Haul pendiri pesantren.

3) Variabel Budaya Pesantren sebagai *The Hidden Curriculum*

Variabel budaya (culture) yakni dimensi sosial yang terkait dengan sistem kepercayaan, nilai-nilai dan struktur kognitif. Faktor-faktornya adalah rumusan tujuan pesantren yang jelas dan dapat difahami oleh semua unsurnya, sebagai hasil konsensus antara pengelola administrasi dan guru; pengelola administrasi memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap guru dan begitu juga sebaliknya, guru memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap guru; pemberian hadiah terhadap mereka yang mencapai prestasi terbaik, dan pemberian hadiah sertahukuman yang dilakukan secara fair dan konsisten kepada para siswa. (Glatthorn dalam Rosyadah, 2013:31).

a) Rumusan tujuan pesantren yang jelas dan difahami oleh semua unsur pesantren.

Pesantren-pesantren yang penulis observasi memiliki tujuan yang jelas dan terukur, sebagai kerangka operasional dari visi dan misi yang dimiliki oleh pesantren. Perumusan tujuan melibatkan semua unsur di pesantren.

Perumusan visi, misi dan tujuan pesantren-pesantren di mulai dari disusunnya Tim Pengembang Pesantren dengan penanggungjawabnya Pimpinan Umum Pesantren dibawah koordinasi bidang pendidikan pesantren. Hasil rumusan kemudian di bawa kedalam rapat yang melibatkan Pimpinan/dewan Kyai, Dewan Guru/Asatidz, Pengurus dan Organisasi Santri untuk di bahas secara bersama-sama dan disepakati bersama. Kemudian rumusan itu akan di pasang di ruangan-ruangan pengurus untuk senantiasa di ingat sebagai bahan acuan dalam pengelolaan program-program.

b) Ekspektasi berimbang antara pengelola administrasi dan guru.

Pengelola administrasi dalam hal ini adalah Pimpinan Pesantren/Dewan Kyai sebagai pengelola utama pesantren. Pimpinan Pesantren memiliki pengharapan yang tinggi agar proses belajar mengajar melalui penyampaian materi ajar pesantren di terima dengan baik oleh santri. Maka guru merupakan ujung tombak pencapaian itu, sehingga posisi guru menjadi sangat penting bagi keberhasilan pembelajaran. Sebab guru sebagai manajer utama dalam kelas yang akan membimbing, mengarahkan, membelajarkan santri sampai berhasil.

Guru di berikan keleluasaan untuk mengekspresikan kemampuan mengajar di kelas dengan berbagai pendekatan dan strategi pembelajaran yang dimiliki oleh guru. Kepercayaan Pimpinan Pesantren terhadap guru-guru sangat tinggi, sebab sebelumnya para guru akan mengalami proses seleksi dengan sangat ketat atas kemampuan mereka dalam penguasaan materi ajar di pesantren yaitu pengkajian terhadap kitab-kitab yang diajarkan.

Begitu pun guru-guru, dimata mereka Kyai adalah sosok yang penuh keteladanan dalam segala hal. Keikhlasan, ketawadulan, totalitas penyerahan segala urusan terhadap Allah SWT menjadi nilai tambah hormat dan ekspektasi guru terhadap Kyai. Guru-guru percaya bahwa Kyai memiliki jangkauan melebihi mereka dari sisi spiritualitas, sehingga guru-guru sangat yakin dan percaya diri ketika berhadapan dengan antri didalam kelas, bahwa mereka di dukung sepenuhnya oleh Kyai.

c) Ekspektasi Tinggi Pengelola Administrasi dan Guru terhadap santri untuk penguatan pelayanan akademik.

Dalam pembelajaran di pesantren, santri diposisikan sebagai sosok yang harus dijaga, dibimbing dan diarahkan segala potensinya untuk kemajuan di masa yang akan datang. Pembelajaran diarahkan untuk penguatan kemampuan kognitif, afektif, psikomotorik dalam kerangka nilai-nilai dan tradisi pesantren. Setiap hari selama duapuluh empat jam sampai ahir masa belajar santri, pesantren senantiasa mencukupi

berbagai kebutuhan santri secara optimal. Pesantren menjadi rumah baru bagi santri, segala aktifitas hariannya diarahkan dengan penuh kekeluargaan seperti layaknya pengawasan orang tua terhadap anak. Pesantren menjadi rumah yang nyaman bagi santri untuk mencurahkan segala hal yang menjadi kebutuhannya, peran pengganti orang tua adalah pesantren dengan beragam anggota keluarga yang menjadi penghuninya.

Fungsi keluarga mewujudkan dalam peran pesantren yaitu dalam fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta dan kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi sosialisasi dan pendidikan. Hanya fungsi reproduksi dan fungsi Ekonomi ekonomi yang tidak dialami secara langsung di pesantren. (8 Fungsi Keluarga menurut Kemenag dalam Buku Bimbingan Perkawinan, 2020).

Fungsi keagamaan pesantren sebagai tempat santri mengenal, menanamkan dan menumbuhkan serta mengembangkan nilai-nilai agama, sehingga bisa menjadi insan-insan yang agamis, berakhlak baik dengan keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Fungsi ini secara langsung dilakukan oleh pesantren sampai santri memiliki kemampuan memadai dalam hal keagamaan mereka.

Fungsi Sosial Budaya, pesantren memberikan kesempatan kepada seluruh santri dalam mengembangkan kekayaan sosial budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan. Hal ini terwujud dalam ekspresi penggunaan bahasa, pemilihan kegiatan ekstrakurikuler pesantren, dan interaksi antar berbagai santri dari latar belakang budaya dan sosial.

Fungsi Cinta dan Kasih Sayang pesantren terwujud dalam memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan Kyai dan Guru dengan santri, santri dengan santri lainnya, serta hubungan kekerabatan antar generasi santri yang awal dan santri baru, sehingga pesantren menjadi tempat bersemainya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin. Cinta kasih yang landasi penghormatan santri terhadap Kyai, dilanasi keyakinan

bahwa keberkahan selalu ada dalam setiap insyan yang tengah berjuang menimba ilmu.

Fungsi Perlindungan pesantren sebagai tempat berlindung santri dalam menumbuhkan rasa aman dan tentram serta kehangatan bagi setiap anggota keluarga pesantren. Perlindungan yang memberikan rasa aman santri secara lahir dan bathin, perlindungan atas dasar ilmu dan saling menjaga satu sama lain.

Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan pesantren yaitu dalam memberikan peran dan arahan mendidik kepada santri agar mereka dapat menyesuaikan kehidupannya di masa mendatang. Santri bersosialisasi dalam batas yang telah ditentukan, sosialisasi berdasarkan kesamaan keinginan untuk menjadi sosok lebih menghargai, empati terhadap lingkungan.

Fungsi Pembinaan Lingkungan dilakukan pesantren dalam memberi kemampuan kepada setiap anggota santri sehingga dapat menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai dengan aturan dan daya dukung alam dan lingkungan yang setiap saat selalu berubah secara dinamis. Santri di tempa dengan lingkungan kehidupan yang tertata berdasar jadwal dan harus diikuti setiap waktu, santri dilibatkan dalam semua keadaan belajar di pesantren; pagi siang dan malam. Bermetamorfosis dari kebiasaan rumah dengan kebiasaan pesantren yang mendorong kemamuan dirinya untuk terus berkembang.

d) Pemberian hadiah serta hukuman secara fair dan konsisten kepada para santri.

Prestasi santri di pesantren akan dihargai sebagai buah dari komitmen pesantren dalam rangka menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Penghargaan terhadap santri berprestasi di wujudkan dengan pemberian hadiah kecil berupa alat tulis dan sertifikat. Jumlah hadiah mungkin kecil, namun makna dan nilainya akan besar bagi santri. Pemberian hadiah biasanya dilakukan pada saat kegiatan perlombaan ekstrakurikuler dan kenaikan tingkat. Pada momen itu orang

tua hadir dan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi orang tua santri.

Disisi lain, komitmen pada aturan dan tata tertib pesantren menjadi hal yang diutamakan. Hal ini dilakukan untuk menjaga suasana pembelajaran yang nyaman, tenang dan sama-sama berhasil. Penegakan aturan pesantren diawali dengan sosialisasi pada saat awal santri masuk pesantren. Tata tertib ini diketahui oleh semua pihak, orang tua dan santri. Sehingga ketika terjadi pelanggaran terhadap tata tertib, maka semuanya memiliki konskuensi untuk ditegakkan. Tata tertib ini disusun bukan untuk menghukum seseorang, namun lebih kepada sikap selalu mawas diri bahwa di balik kebebasan yang dilakukan oleh seseorang, terhadap hak yang lain untuk dijaga.

Bobot Teoretis

Pembelajaran berbasis kitab-kitab pesantren rujukannya sangat jelas. Kitab yang diajarkan, pasti kitab terpilih yang sudah secara berantai (*sanad*) digunakan di pesantren dan sebelumnya mengalami proses pemilihan oleh Kyai secara ketat. Pesantren akan terus menjaga mata rantai keilmuannya dengan mengacu kepada apa yang biasa digunakan sebelumnya dalam pembelajaran di pesantren, dan terus melakukan seleksi terhadap hal-hal yang baru.

Kyai dan para guru dalam proses pembelajaran, akan memberikan materi pengkajian kitab di kaitkan dengan kejadian atau fenomena terkini. Sehingga santri tidak tertinggal dalam menyerap informasi terkini yang tengah terjadi. Fenomena-fenomena yang ada, dipadupadankan dengan pengkajian kitab sehingga mendorong lahirnya kemampuan berfikir kritis santri atas fenomena baru berbanding dengan materi pembelajaran kitab. Dalam tradisi pesantren biasanya disebut dengan *bahtsul masail*, mengkaji fenomena sosial perspektif keilmuan pesantren berbasis rujukan kitab-kitab pesantren.

Di setiap tingkatan santri-dasar-menengah-tinggi-kebiasaan *bahtsul masail* ini dilakukan, agar santri peka terhadap perubahan dengan meresponnya melalui kritisisme rujukan kitab pesantren. Proses ini akan terus

dilakukan, sampai pada titik kesimpulan yang memadai dan bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Bahkan pada kejadian-kejadian atau pengealaman sederhana santri di pesantren akan di cari rujukan keilmuannya.

Pendidikan Ekstrakurikuler

Pesantren-pesantren membuka kelas ekstrakurikuler untuk menyalurkan minat dan bakat santri. Waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan jam pembelajaran kelas pesantren, dan di waktu-waktu tertentu dilaksanakan penampilan mata pelajaran ekstrakurikuler yang disaksikan oleh seluruh warga pesantren.

Kegiatan ekstrakurikuler melatih tanggung jawab dan kemandirian, melalui kegiatan ekstrakurikuler secara otomatis santri akan belajar bertanggung jawab terhadap sesuatu dan menjadi mandiri. Sebab setiap aktivitas ekstrakurikuler dikelola dan diurus sendiri oleh para santri, sedangkan guru hanya menjadi Pembina. Sehingga setiap ada kegiatan tertentu pada ekstrakurikuler maka santri akan mengurus semuanya. Dengan demikian santri belajar bertanggung jawab melakukan sesuatu pekerjaan hingga selesai, dan menjadi lebih mandiri dengan mengurus acara dalam ekstrakurikuler tersebut.

Ekstrakurikuler sebagai tempat mengasah bakat dan minat santri; manfaat kegiatan ekstrakurikuler lainnya yaitu bisa menjadi tempat untuk melatih dan mengembangkan potensi. Santri bebas memilih ekstrakurikuler yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Ekstrakurikuler tersebut akan melatih semua bakat dan potensi dalam diri santri sehingga bisa lebih terarah dan berkembang.

Ekstrakurikuler melatih kerja sama; salah satu tujuan kegiatan ekstrakurikuler adalah untuk melatih kemampuan bekerjasama antara santri. Dimasa yang akan datang santri harus mampu berbaur dengan lingkungan baru; jenjang studi baru atau pekerjaan, maka kerja tim dengan orang lain merupakan sesuatu yang pasti dialami. Maka ekstrakurikuler kesempatan santri untuk melatih kemampuan bekerjasama agar nantinya tidak kaget saat turun langsung ke masyarakat.

Partisipasi Pengelolaan Pesantren

Sebagai bentuk komitmen pesantren terhadap partisipasi orang tua santri, maka pada tahap awal orang tua santri mendaftarkan anak-anaknya kepesantren, orang tua akan diundang untuk hadir pada kegiatan rapat. Pada saat rapat dilaksanakan terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan, diawali dengan registrasi orang tua sebagai peserta rapat, pemaparan program pesantren, penandatanganan tata tertib pesantren, dan ijab qobul penyerahan anak untuk belajar di pesantren. Prosesi ijab qobul dilaksanakan secara berjamaah, pihak pesantren akan menuntun ijab qobul dan diikuti oleh seluruh orang tua santri.

Pada saat itu, terjadi sinkronisasi aturan-aturan yang biasa dilakukan di rumah dan di pesantren. Pembiasaan yang baik di rumah akan dilaksanakan di pesantren dengan beberapa tambahan kegiatan kepesantrenan. Ketika santri kembali ke rumah, maka sinkronisasi itu tetap dilakukan, pembiasaan yang baik di pesantren di implementasi dalam kegiatan sehari-hari di rumah oleh santri. Sehingga konsistensi penanaman nilai-nilai tetap dilakukan sebagai upaya mempersiapkan anak dimasa yang akan datang.

Simulasi Proses Demokrasi

Fokus analisis pada simulasi proses demokrasi sebagai implementasi dari pendidikan demokrasi di pesantren adalah seperti yang di ungkapkan Zamroni (2013:26) meliputi variabel pemilihan ketua santri secara terbuka, struktur organisasi siswa dengan pembagian tugas yang jelas, pergantian kepengurusan secara berkala, melakukan rapat-rapat, melakukan kaderisasi dan latihan kepemimpinan.

Pemilihan Ketua Santri di ketiga pesantren yang diteliti dilakukan secara terbuka oleh seluruh santri. Tahap yang dilakukan di mulai dari seleksi calon Ketua Santri, seleksi dilakukan oleh Pimpinan Pesantren terkait dengan berbagai hal. Setelah seleksi dilakukan, Pimpinan Pesantren menyetujui beberapa calon Ketua, hasil persetujuan inilah yang akan di serahkan kepada

panitia pemilihan untuk di pilih secara langsung oleh seluruh santri.

Ketua terpilih akan secara bersama-sama menyusun kepengurusan bersama tim formatur pemilihan ketua. Kepengurusan ini untuk masa kerja 1 (satu) tahun, dan akan terjadi pergantian pada tahun berikutnya. Kemudian pengurus yang baru akan melengkapi struktur kepengurusan dengan menempatkan santri-santri yang sudah memiliki kompetensi dan sudah memasuki fase kaderisasi.

KESIMPULAN

Sesuai dengan tujuan penelitian ini yang ingin menelaah manajerial pendidikan pesantren dalam membina jiwa demokratis dalam berbangsa dan bernegara, maka dapat disimpulkan sebagai hasil temuan dan analisis terhadap tiga pesantren yang ditelaah. Manajemen Pendidikan Demokrasi di pesantren di tiga pesantren di kabupaten Cianjur telah mengikuti kiadah manajemen yang semestinya, dimana dalam implementasinya, fungsi-fungsi manajemen dilaksanakan, dari mulai dari tahap perencanaan pendidikan, pengorganisasian pendidikan demokrasi, pelaksanaan/ implementasi pendidikan demokrasi, dan pengendalian pendidikan demokrasi telah dilakukan.

Kurikulum pendidikan pesantren secara eksplisit tidak mencantumkan istilah pendidikan demokrasi yang dirancang sejak awal. Istilah Pendidikan Demokrasi secara khusus tidak ditemukan dalam dokumen-dokumen pembelajaran yang ada di pesantren. Namun semangat, nilai, gagasan dan praktik demokrasi justru mewujud dalam kehidupan keseharian pesantren, seperti terbangunnya semangat kerjasama dalam proses pembelajaran santri, penghargaan kepada sesama santri dan guru-guru, ustadz dan Kyai, juga pemilihan ketua santri secara regular terjadi dalam kehidupan keseharian pesantren dan memiliki pengaruh yang besar dan bermakna terhadap perkembangan santri. Maka, jika dilihat dari perspektif kurikulum, bisa disebutkan sebagai *The Hidden Curriulum*, yakni kurikulum secara definitive digambarkan sebagai berbagai

aspek dari pesantren diluar kurikulum yang dipelajari; seperti aspek organisasi, system sosial dan budaya, namun

mampu memberikan pengaruh dalam perubahan nilai, persepsi dan perilaku santri.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Khaerul. (2008). *Sejarah Perkembangan jamiyah Nahdlatul Ulama*. Khalista: Jogjakarta.
- Asyari, K. (2005). *Sang Kyai Fatwa KH.M. Hasyim Asy'ari Seputar Islam dan Masyarakat*. Yogyakarta: Qirtas (Kelompok Penerbit Qalam).
- Boone, E. Louise & Kurtz, L. David (1984). *Principles of Management Second Edition*. New York: Random House Budiness Division.
- Bruinessen, Martin van. (1994), *NU Tradisi Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*". Jogjakarta: LKIS.
- Budiardjo, Prof. Miriam. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia.
- Bungin, Burhan (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif; Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bustami, Abdul Latief. (2009). *Kiai Politik Politik Kiai Membedah Wacana Politik Kaum Tradisionalis "Sebuah Kajian tentang Relasi Islam, Kiai dan Kekuasaan Melalui Kitab Kuning dari Lingkungan Pesantren"*. Malang: Pustaka Bayan.
- Catt, Helen. (1999). *Democracy in Practice*. London and New York: Routledge.
- Creswell, Jhon. W. (2002). *Research Design Qualitative & Quantitative*
- Cricky, B. (2002). *Democracy a Very Short Introduction*. New York: Oxford.
- Cunningham, Frank. (2002). *Theories of Democracy*. London and New York: Routledge.
- Depdikbud, (1980), *Manajemen*. Jakarta: Depdikbud.
- Dhofier, Zamakhsyari. (2013), *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES
- Djamari. (1985). *Disertasi: Nilai-Nilai Agama dan Budaya yang melandasi Interaksi Sosial di Pondok Pesantren Cikadueun Banten*. Bandung: Fakultas Pasca Sarjana IKIP Bandung.
- Fadeli, S., & Subhan, M. (2010). *Antologi NU Sejarah Istilah Amaliah Uswah*. Surabaya: Khalista.
- Fealy & Barton, Greg ((1997). *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*. Yogyakarta: LKiS.
- Fealy, Greg. (2003). *Ijtihad Politik Ulama Sejarah NU 1952-1967*. Yogyakarta: LKiS.
- Hamidi, J., & Lutfi, M. (2010). *Entrepreneurship Kaum Sarungan*. Surabaya: Khalifa.
- Haramain, A., & Nurhuda, M. (2000). *Mengawal Transisi Refleksi atas Pemantauan Pemilu'99*. Jakarta: JAMPPI-PB PMII & UNDP.
- Harists, A. (2010). *Islam NU Pengawal Tradisi Sunni Indonesia*. Surabaya: Khalista.
- Hendriks, F. (2010). *Vital Democracy A Theory of Democracy in Action*. New York: Oxford University Press.
- Janssen, D. (1990). Inventarisasi Golongan-golongan, Kelompok-kelompok dan orang-orang terkemuka. In S. & Sajogyo, *Sosiologi Pedesaan Jilid 1* (pp. 143-144). Yogyakarta: Gadjah Mada Universiti Press.
- Komara, Endang (2007). *Metode Penelitian Ilmiah*, Bandung: Multazam
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Rrevisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Yusuf, KH. (2003). *Mudzakarah Jam'iyyah Dentuman Kritisisme-Ideologis*. Bandung: Media Cendekia.
- Muhammadiyah, H., & Fatoni, S. (2004). *NU: Identitas Islam Indonesia*. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Sosial, Elsas.
- Mutakin, Awan. (1994). *Disertasi: Keberadaan Pesantren Darul Hikam Kiangroke Dalam Transformasi Nilai (Menilik Mutu Pribadi Ajengan dan Hakekat Pendidikan IPS di Pesantren)*. Bandung: Program Pascasarjana IKIP Bandung.
- Nadjib, E. A. (1994). *Kiai Sudrun Gugat*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- PBNU, (2005), *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU*, Jakarta: PBNU.
- Rakhmat, Jalaludin. (2008). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Ridwan, N. K. (2010). *NU & Bangsa 1914-2010 Pergulatan Politik & Kekuasaan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rosyada, Dede (2004). *Paradigma Pendidikan Demokratis Sebuah Model Pelibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Sajogyo, & Sajogyo, P. (1990). *Sosiologi Pedesaan Jilid 1*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sanusi, Ahmad. (2013). *Kepemimpinan Pendidikan*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Schermerhorn, John R. Jr. (1997). *Manajemen Buku 1 Edisi Bahasa Indonesia 5e*. Yogyakarta: Andi.
- Sitompul, E. M. (1996). *NU dan Pancasila*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Sugiyono, (2009). *Metode Penelitian Ilmiah*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Sukmadinata, et.al. (2007), *Panduan Penulisan Karya Ilmiah (Makalah, Lporan Buku, Tesis dan Disertasi)*. Bandung: Uninus.
- Suryadi, Karim. (2009). "Balihocracy" *Komunikasi Politik dan Orientasi Pemasaran dalam Pemilu*. Bandung: Pusat Studi Agama dan Pembangunan (PSAP).
- Sutarto, Ayu. (2008). *Menjadi NU menjadi Indonesia Pemikiran K.H. Abdul Muchith Muzadi*. Surabaya: Khalista.
- Tilly, Charles. (2007). *Democracy*. New York: Cambridge University Press.
- Tim Penyusun PP LDNU. (2007). *Potret Gerakan Dakwah NU Hasil Mukernas IV LDNU*. Jakarta: PP LDNU Publishing.
- Turmudi, Endang.Dr (2004). *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*. Yogyakarta: LKiS.
- Undang Undang Pesantren, UU Nomor 18 Tahun 2019.
- Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 20 Tahun 2003
- Wahid, Abdurrahman. (2010). *Menggerakkan Tradisi Esai-Esai Pesantren*. Yogyakarta: LKiS.
- PBNU, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama. PBNU: Jakarta.